

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jürgen Habermas merupakan salah satu filsuf paling berpengaruh di era kontemporer. Ia juga merupakan seorang filsuf yang memiliki sumbangan penting pada studi atas modernitas. “Hanya Habermas, tampaknya, ... yang menempatkan dirinya dalam posisi pragmatis terhadap modernitas dan itu membuatnya menjadi satu-satunya juru bicara modernitas (Afifi, 2019, hlm. 17).” Tidak hanya mewarisi semangat *Frankfurt School*, Habermas berhasil memberikan terobosan penting untuk mencegah teori kritis mandek dalam memandang modernitas seperti yang dikembangkan Marcuse dan Adorno (para pendahulu *Frankfurt School*). Habermas menyelesaikannya dengan satu tarikan nafas yakni kritik atas rasionalitas instrumental sehingga membuka peluang pada optimismenya atas rasionalitas komunikatif dan ruang publik.

Rasionalitas komunikatif adalah tandingan atas rasionalitas instrumental yang menekankan logika, tujuan dan efisiensi semata. Dalam administrasi maupun logika birokrasi rasionalitas jenis itu ‘mungkin’, tetapi dalam masyarakat dan ‘negara’ dalam arti sosial-demokratis hanya akan membuat rasionalitas instrumental menjadi penjara bagi kebebasan dan kemanusiaan. Rienstra & Hook (2006) dalam artikel jurnalnya berjudul *Weakening Habermas: the Undoing of Communicative Rationality* menulis jika “Telaah terhadap konstruksi rasionalitas komunikatif Habermas dan tuntutan yang ia ajukan kepada para pelakunya memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang diharapkan Habermas dalam proses deliberasi (hlm. 314).” Rasionalitas instrumental mengeringkan demokrasi dan membuatnya terjebak pada prosedur hampa makna dan formalitas semata, rasionalitas komunikatif hadir untuk menjadi terobosan pada rasionalitas yang mendasarkan dirinya dalam percakapan rasional berbasis empati dan toleransi (inilah yang disebut nanti oleh Habermas sebagai kondisi ideal dari demokrasi deliberatif).

Tidak luput dari pengamatan penulis bahwa setiap bangsa seringkali mengembangkan semacam rasionalitas yang mengakar pada kesadaran akan sejarah yang sama dan kultur kebangsaan, sebut saja itu ideologi. Ideologi dalam suatu bangsa bukanlah suatu masalah seperti bagaimana para filsuf marxis mendefinisikannya, tetapi ideologi menjadi masalah jika membeku dan menggulung menjadi rasionalitas semu yang menghalangi komunikasi dan percakapan bebas di masyarakat. Misalnya dalam masyarakat modern saat ini, “Dalam proses yang oleh Habermas disebut sebagai rasionalisasi dunia kehidupan, budaya modern dianggap telah menjadi tidak mampu lagi mentoleransi distorsi ideologis (Cook, 2000, hlm. 68). Ideologi yang awalnya dikembangkan sebagai identitas bangsa bertransformasi menjadi ideologi yang penuh dengan rasionalitas instrumental yang dipaksakan, mengerdilkan realitas dan jauh dari dunia kehidupan (*lebenswelt*).

Dalam konteks Indonesia, problem itu tercermin dalam bagaimana Pancasila hadir dalam dinamika kehidupan di masyarakat. Pancasila hadir menjadi simbol, dasar dan fundamen nilai bangsa Indonesia. Ia selalu dikutip dalam dokumen negara, aturan hukum, pidato para pejabat, jargon-jargon partai hingga kurikulum pendidikan. Namun dalam praktiknya inilah Pancasila kurang dibicarakan sebagai wacana kehidupan. Seringkali Pancasila dihidangkan sebagai konsensus baku semata dan bukan sebagai dialog ide kebangsaan. Contohnya seperti fenomena kepartaian di Indonesia saat ini, dimana “... asas atau ideologi (Pancasila) itu berhenti menjadi (sekedar) dokumen tertulis sebagai prasyarat anggaran dasar dan rumah tangga partai-partai yang diharuskan oleh undang-undang (Haris, 2014, hlm. 19).

Masalah yang muncul disini bukanlah Pancasila itu sendiri, melainkan Pancasila dalam *praxis* dan kekuasaan yang dijadikan sekedar jargon kosong yang mendistorsi komunikasi. Penulis akui jika bangsa kita telah belajar dari sejarah orde baru dimana Pancasila diinterpretasikan secara otoritatif. Di era reformasi ini Pancasila memiliki kedudukan untuk diinterpretasi oleh publik, namun dalam kenyataannya interpretasi publik ini tidak terjadi karena ruang

publik bangsa kita yang masihlah buruk. Seringkali Pancasila tereduksi menjadi sekedar jargon kekuasaan yang pragmatis, dimanfaatkan oleh kaum oportunis untuk sekedar melanggengkan kekuasaannya. Sumartias & Hamim (2021) melihat fenomena ini sebagai *paradoks* dan *ambigu* seperti dalam artikel jurnalnya berjudul *Pancasila Paradoks Telaah Praksis Sosial Politik* mereka menulis jika “Ketidakajegan dan ketidakjelasan orientasi mengelola negeri dengan ideologi Pancasila, makin transparan dan sangat erat dengan kepentingan kuasa yang ambigu (hlm. 1610).” Pancasila yang demikian itu bersifat paradoks karena ia berperan sebagai ideologi bangsa dan ditempatkan juga sebagai ideologi terbuka, tetapi pemerintah menciptakan iklim ruang publik yang buruk dan terbatas sehingga Pancasila tidak turun sebagai hasil dialog bangsa yang aktual.

Habermas dalam pemikirannya banyak membahas bagaimana sistem dan kekuasaan bisa begitu invasif dalam membajak dunia kehidupan. Ketika ruang hidup didominasi oleh logika rasionalitas instrumental, sistemik, strategis dan fungsional menciptakan masyarakat modern yang selalu saja gagal dalam membentuk nilai kehidupan yang otonom. Individu larut menjadi ‘atom’ dalam sistem dan selalu dihibur dalam realitas palsu yang terjadi akibat distorsi komunikasi. Ideologi rawan untuk digunakan oleh ‘siapapun’ dengan cara yang demikian, entah itu ideologi (negara), ideologi pasar, atau ide-ide lain yang bersifat *fiks*. Segala rasionalitas yang jauh dari percakapan hanya akan menciptakan dominasi dan penindasan. Ini yang sebenarnya diperjuangkan oleh Teori Kritis Madzhab Frankfurt, sehingga jelas bahwa posisi Habermas serius dalam menempatkan dirinya sebagai epistemolog yang membebaskan teori kritis dari jejaring ideologi yang sama (Disco, 1979, hlm. 208).

Pancasila, jika ingin terus relevan, harus dibaca ulang bukan sebagai instruksi tunggal dari negara, tetapi harus sebagai ruang terbuka yang memungkinkan masyarakat berpikir dan berdiskusi. Memahami Pancasila sebagai ruang ideologis yang terbuka membawa kita pada potensi aktualisasi Pancasila, menurut Agus (2016) dalam penelitiannya berjudul *Relevansi*

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi mengungkapkan jika ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal (hlm. 231). Artinya terbuka tidak semata-mata menjadi semacam ideologi yang ‘relatif’ melainkan ideologi yang diperlakukan (sebuah interpretasi yang lebih aktual daripada konsep ‘ideologi terbuka’ khas orde baru). Karena itulah menempatkan Pancasila pada kerangka rasionalitas komunikatif artinya memposisikan Pancasila bukan sekedar warisan nilai bangsa yang dirumuskan oleh para *founding father* bangsa Indonesia melainkan juga memberikan kesempatan bagi Pancasila untuk turun ke ruang publik dan diaktualkan oleh bangsa ini secara kontinu. Tugas *founding father* untuk menciptakan konsensus agung bangsa kita telah usai, kini ia (Pancasila) menjadi warisan bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beridentitas untuk terus mempercakapkan nilai-nilai fundamental didalamnya.

Problem yang diteliti dalam penelitian ini adalah dominasi rasionalitas instrumental dalam wacana ideologis di Indonesia, yang membuat komunikasi seputar Pancasila menjadi tertutup, sepihak dan tidak partisipatif. Jika Pancasila tetap ingin menjadi semacam ‘ideologi pemersatu’ atau perekat hubungan kebangsaan dan konsensus agung dari bangsa Indonesia yang beragam ini, secara epistemologis Pancasila harus dipahami dalam kerangka rasionalitas komunikatif. Pancasila dapat menjadi semacam ‘ruang ideologis’ terbuka dari berbagai pemikiran dan sintesisnya dalam memahami aktualitas dinamika dari hidup berbangsa dan bernegara. Pertanyaannya, “apakah mungkin?” Kajian ini diperlukan karena Pancasila bukan sekedar dasar hukum melainkan medan etis yang memiliki posisi fundamental bagi kehidupan bangsa Indonesia, “... maka Pancasila dapat menjadi *sistem etika* yang sangat kuat, karena nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif (Amri, 2018, hlm. 763).”

Penelitian ini tidak bertujuan menyoal validitas Pancasila, melainkan membuka kembali cara kita berbicara tentangnya. Dengan menjadikan Pancasila sebagai ruang diskursif, masyarakat dapat menjadi subjek yang berpikir dan

berdialog sekaligus membuka peluang dari ‘kemungkinan’ atas jalan terbaik dalam memahami Pancasila sebagai hasil dari diskursus daripada memahaminya sekedar sebagai kerangka doktrinal. Untuk itu, pemikiran Habermas menjadi alat bantu konseptual yang relevan, karena menawarkan cara pandang etis dan rasional dalam membangun komunikasi sosial-politik. Dalam bukunya berjudul *Teori Tindakan Komunikatif (Buku Dua): Kritik atas Rasio Fungsionalis* Habermas (2012) mengatakan jika sistem (kenegaraan) harus menyandarkan dirinya pada *lebenswelt* (dunia kehidupan) selengkapanya ia menulis,

“Seiring dengan itu, dunia-kehidupan tetap menjadi subsistem yang menentukan pola-pola sistem sosial secara keseluruhan. Dengan demikian, mekanisme sistemik perlu disandarkan pada dunia-kehidupan: mereka harus diinstitusionalisasikan (dilembagakan). Institusionalisasi level baru diferensiasi sistem ini juga dapat dimengerti dari perspektif internal dunia kehidupan (hlm. 209).”

Melalui pendekatan filsafat politik, khususnya dari tradisi teori kritis, penelitian ini mencoba menghadirkan kontribusi pemikiran Habermas terhadap praktik demokrasi yang lebih inklusif di Indonesia. Teori kritis (dari Horkheimer hingga Habermas) menempatkan filsafat pada fungsinya sebagai ‘teori emansipatoris’, filsafat bukan hanya menjadi semacam cara mendeskripsikan dunia atau mungkin kutub lain yang berseberangan dari itu yakni ‘idealisme atas realitas’ melainkan menggeser fokus filsafat sebagai kritik atas masyarakat. Pendeknya, teori kritis hendak membebaskan masyarakat dari keadaannya yang irasional zaman ini, ia hendak menjadi teori emansipatoris (Sindhunata, 2019, hlm. 126). Jika ingin membentuk iklim bernegara yang ‘demokratis’ tidak cukup dengan memahami nilai-nilai demokratisme secara ideologis, melainkan memahaminya sebagai ‘hidup’ dan kehidupan. Demokrasi perlu diwarnai secara *praxis* melalui dialog dan komunikasi berbasis toleransi dan keadaan bebas distorsi.

Habermas memberi kita peta konseptual untuk membayangkan ulang bagaimana ruang publik seharusnya bekerja. (Menurut Habermas) ruang publik dapat dipahami sebagai *res publica* sudah terdefinisi sangat baik, *res* (urusan)

dan *publica* (umum) memberi kerangka yang jelas mengenai istilah publik yang digunakan saat ini (Supriadi, 2017, hlm. 5). Oleh karena itu Habermas sangat menekankan bahwa kebenaran di ‘ruang publik’ hanya dapat dicapai melalui komunikasi rasional dengan rasionalitas komunikatifnya. Pancasila bukan hanya bisa melainkan ‘harus’ dibaca dalam paradigma diskursus dimana diskusi kebangsaan tidak stagnan dan terus menjadi aktual, singkatnya Pancasila diharapkan menjadi milik ruang publik dimana kebenaran intersubjektif jauh lebih ditekankan dalam memahami Pancasila.

Dengan refleksi ini diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan wacana Pancasila sebagai ruang ideologis terbuka, serta memberi dorongan etis untuk membangun kembali budaya diskusi di tengah masyarakat. Penulis meyakini jika para pendiri bangsa ini tidak mengharapkan Pancasila untuk dibukukan menjadi ideologi yang kaku seperti bagaimana rezim orde baru membaca Pancasila, atau juga menjadikan Pancasila sebagai wacana dan narasi atas jargon kosong dari orang-orang pragmatis bangsa ini. Para pendiri bangsa justru menyusun Pancasila sebagai ‘nilai agung’ yang *fluid* dan perlu untuk terus diaktualisasikan. Burlan (2020) seorang profesor dari UIN Raden Fatah Palembang sekaligus penulis aktif teori dan isu sosial, politik, hukum di Indonesia, ia menulis dalam artikel ilmiahnya berjudul *Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila* bahwa perumusan Pancasila diawali oleh diskursus dan perlu untuk dijalankan dalam diskursus pula. Soekarno menekankan bahwa Pancasila bukan milik perorangan, kelompok atau etnis tertentu melainkan milik bangsa Indonesia secara utuh, selengkapnya ia menulis bahwa,

“Dalam merumuskan Pancasila, Soekarno (bapak bangsa) berusaha menyatukan semua pemikiran dari berbagai tokoh dan golongan serta membuang jauh-jauh kepentingan perorangan, etnik maupun kelompok. Soekarno menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan untuk semua golongan. Menyadari akan kebhinekaan bangsa Indonesia tersebut, Soekarno mengemukakan konsep dasar Pancasila yang didalamnya terkandung semangat ‘semua buat semua’ (hlm. 150).”

Persoalan dominasi rasionalitas instrumental dalam diskursus ideologi sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari problem pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan yang seharusnya menjadi wahana pembentukan warga negara yang demokratis, kritis dan reflektif justru masih cenderung berjalan dalam corak pembelajaran yang formalistik dan dogmatis. Ideologi kebangsaan seperti Pancasila lebih sering disampaikan sebagai paket nilai-nilai siap pakai yang harus diterima dan dihafalkan oleh peserta didik, bukan sebagai wacana yang terbuka untuk dipertanyakan, diperdebatkan dan atau dimaknai ulang secara lebih kontekstual. Dalam hal ini, rasionalitas instrumental tidak hanya hadir dalam praktik politik dan pemerintahan tetapi juga menjalar ke ruang-ruang pendidikan termasuk kelas-kelas pendidikan kewarganegaraan. Banyak guru PKn masih mengandalkan metode pengajaran tradisional, seperti ceramah dan hafalan, yang kurang efektif dalam mengembangkan keterampilan analitis peserta didik (Salsabila dkk., 2024, hlm. 193). Semuanya menandakan bahwa pendidikan kewarganegaraan kita belum sepenuhnya mencerminkan semangat deliberatif yang menjadi ruh demokrasi itu sendiri. Justru semangat deliberasi dalam pendidikan sebenarnya ditemukan pada semangat pencarian dan kolaborasi aktif secara diskursif dan kritis, ini membutuhkan model pembelajaran yang tepat dan kondisi yang mendukung.

Model pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang akan diajarkan oleh guru akan membuat kegiatan pembelajaran lebih aktif. Siswa lebih terlibat secara penuh untuk mencari ilmu pengetahuannya sendiri. Sehingga apabila siswa dapat terlibat secara penuh maka ia akan lebih aktif dan kritis dalam belajar. ... Berpikir kritis juga dapat dipahami sebagai kegiatan menganalisis idea atau gagasan ke arah yang lebih spesifik, membedakan secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkannya kearah yang lebih sempurna. Berpikir kritis berkaitan dengan asumsi bahwa berpikir merupakan potensi yang ada pada manusia yang perlu dikembangkan untuk kemampuan yang optimal (Halimah dkk., 2024, hlm. 688).

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, isu tertutupnya ruang diskursus ideologis menjadi sangat penting karena PKn tidak hanya bertujuan untuk menanamkan pengetahuan kewarganegaraan secara normatif, tetapi juga

mendorong terbentuknya warga negara yang reflektif, partisipatif dan kritis. Bila Pancasila hanya diajarkan sebagai dogma atau seperangkat nilai yang harus diterima tanpa pemahaman mendalam dan diskusi terbuka, maka PKn gagal menjadikan peserta didik sebagai subjek demokrasi. Pendidikan yang demikian justru mereproduksi budaya politik pasif yang bertentangan dengan semangat demokrasi deliberatif. Oleh karena itu, pembaruan dalam pendekatan pembelajaran PKn sangat dibutuhkan agar mampu menjadikan ide Pancasila sebagai bahan diskursus, bukan sekedar doktrin. Dengan kata lain, permasalahan ideologi yang tertutup dan sarat muatan simbolik ini secara langsung berada dalam lingkup keilmuan PKn karena menyangkut praksis pembelajaran dan kesadaran kewarganegaraan yang kritis dan rasional.

PPKn mempunyai peranan penting sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan keterampilan berpikir kritis peserta didik. ... Untuk mendorong kemampuan keterampilan berpikir kritis peserta didik untuk mencapai hasil yang maksimal atau kontekstual, baik secara individu maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan model pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah yang terjadi dalam pembelajaran PPKn (Sulianti & Murdiono, 2017, hlm. 166).

Kondisi komunikasi ideologis yang tertutup ini tidak hanya tampak dalam politik praktis, tetapi juga tercermin dalam praktik pendidikan, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam berbagai observasi dan kajian, ditemukan bahwa proses pembelajaran PKn di banyak sekolah masih bersifat satu arah, menekankan hafalan terhadap sila-sila Pancasila atau doktrin normatif tanpa membuka ruang diskusi kritis dan reflektif. Misalnya, peserta didik seringkali hanya diminta menafsirkan ulang nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau realitas sosial kontemporer. Hal ini mengakibatkan terjadinya dekontekstualisasi Pancasila dari dunia kehidupan siswa. Pancasila dipelajari sebagai teks mati, bukan sebagai nilai yang hidup dan bisa diperdebatkan dalam ruang kelas. Pendidikan yang demikian tidak hanya gagal menumbuhkan semangat kebangsaan, tetapi juga gagal melatih daya nalar kritis peserta didik terhadap makna ideologi bangsanya.

Maka dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, pemikiran Habermas tentang rasionalitas komunikatif menjadi relevan untuk dijadikan lensa kritik sekaligus tawaran solusi. Siregar (2021) dalam artikelnya berjudul *Teori Kritis Habermas dan Kebijakan Merdeka Belajar* menulis bahwa “... Habermas menolak praksis sosial dunia kerja yang bersifat mekanik sesuai dengan sistem yang baku. Ia juga menolak komunikasi yang bersifat monologal, dan sebagai gantinya Habermas merekomendasikan komunikasi dialogal emansipatoris (hlm. 149).” Gagasan Habermas membantu kita melihat bahwa krisis Pancasila tidak hanya terletak pada kontennya, tetapi pada cara ideologi itu dikomunikasikan dan diartikulasikan dalam ruang publik maupun ruang kelas. Ketika ruang publik mengalami distorsi dan pendidikan kewarganegaraan dijalankan secara instruksional tanpa dialog, maka nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila beresiko menjadi simbol nirmakna.

Pemikiran Habermas memberi kontribusi yang signifikan bagi perkembangan keilmuan PKn, yakni dengan menekankan bahwa pendidikan bukan sekedar proses transfer nilai, tetapi proses diskursif yang memungkinkan peserta didik menjadi subjek demokratis yang reflektif dan partisipatif. Pancasila sebagai ideologi bangsa seharusnya hadir tidak sebagai produk final yang dogmatis, melainkan sebagai horizon yang terbuka, yang terus diperbarui melalui komunikasi rasional dan inklusif. Dengan cara inilah Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjalankan perannya yang transformatif, yakni tidak hanya mendidik warga negara untuk taat maupun patuh, melainkan juga mempersamainya membentuk rasionalitas melalui dialog dan percakapan.

1.2 Rumusan Masalah

Rasionalitas dalam masyarakat modern tidak lagi hanya menjadi dasar berpikir, tetapi juga menjadi arena pergolakan makna, kuasa dan legitimasi. Dalam masyarakat yang dikendalikan oleh rasionalitas sistemik yang kering makna, *lebenswelt* atau dunia kehidupan mengalami krisis. Jürgen Habermas, melalui kritiknya terhadap rasionalitas instrumental menawarkan konsep

rasionalitas komunikatif sebagai jalan menuju bentuk komunikasi yang lebih reflektif, adil dan partisipatif. Tawaran ini membuka horizon baru bagi penataan kehidupan publik termasuk dalam membaca dan memperlakukan ideologi kebangsaan.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia lahir dari diskursus historis dan bukan dari dogma tunggal. Namun dalam praktik sosial-politik kontemporer, Pancasila seringkali diperlakukan secara simbolik dan finalistik, jauh dari semangat reflektif dan deliberatif yang melatarinya. Dalam konteks inilah, pemikiran Habermas penting untuk dibaca ulang, bukan untuk menggantikan Pancasila, tetapi sebagai lensa kritis untuk mengaktualisasikan kembali Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam ruang publik warga.

Sehingga penelitian ini tidak bertujuan untuk menunjukkan bahwa Habermas menawarkan pemikiran spesifik tentang Pancasila. Sebaliknya, penelitian ini melihat bahwa kerangka teori Habermas terutama tentang komunikasi, ruang publik, dan demokrasi deliberatif memiliki relevansi kuat untuk mengatasi tantangan ideologis dan praksis kebangsaan yang dihadapi Indonesia saat ini. Lebih jauh, kontribusi penelitian ini juga diletakkan dalam konteks keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu dalam upaya membangun kesadaran ideologis warga secara rasional dan emansipatoris. Rasionalitas komunikatif dapat memperkaya praktik PKn agar tidak hanya bersifat informatif-doktrinal, melainkan juga transformatif dan partisipatoris. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Habermas merumuskan rasionalitas komunikatif sebagai kritik terhadap rasionalitas instrumental dan apa implikasinya terhadap pencerahan politik warga negara?
2. Bagaimana ideologi bekerja sebagai ruang perebutan makna dan bagaimana Habermas menawarkan alternatif melalui diskursus publik yang non-dominatif?

3. Bagaimana pemikiran Habermas membantu membaca keterputusan antara Pancasila dengan praksis komunikasi publik kontemporer di Indonesia?
4. Bagaimana revitalisasi ruang publik dapat membuka jalan bagi aktualisasi Pancasila secara lebih demokratis dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan?
5. Bagaimana potensi Pancasila sebagai ruang ideologis terbuka dapat ditanamkan dalam praksis pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari pembentukan warga negara yang reflektif dan partisipatif?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam pemikiran Jürgen Habermas tentang rasionalitas komunikatif sebagai kritik terhadap dominasi rasionalitas instrumental dalam masyarakat modern, serta menggali sejauh mana pendekatan tersebut dapat digunakan untuk mengaktualisasikan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka dan partisipatif. Dengan menggunakan lensa rasionalitas komunikatif, penelitian ini diarahkan untuk membuka ruang pembacaan ulang terhadap Pancasila, tidak sebagai dogma tertutup tetapi sebagai medan diskursif yang hidup, kritis dan relevan dengan dinamika sosial-politik masa kini. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan kontribusi pemikiran Habermas dalam pengembangan praktik dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang reflektif dan deliberatif di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan konstruksi rasionalitas komunikatif dalam pemikiran Jürgen Habermas sebagai kritik terhadap rasionalitas instrumental dan distorsi komunikasi dalam masyarakat modern.
2. Menganalisis prinsip-prinsip dasar rasionalitas komunikatif sebagai dasar reflektif dalam membangun ruang publik yang adil dan setara.

3. Mengkaji keterkaitan antara konsep rasionalitas komunikatif dengan aktualisasi ideologi Pancasila dalam konteks sosial-politik kontemporer di Indonesia.
4. Mengidentifikasi kontribusi pendekatan rasionalitas komunikatif terhadap pembaharuan diskursus ideologi dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.
5. Merumuskan rekomendasi etis-reflektif bagi penguatan demokrasi deliberatif melalui revitalisasi komunikasi publik berbasis nilai-nilai Pancasila.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini menyumbang pada pengembangan studi filsafat sosial-politik, khususnya dengan menghadirkan pembacaan buku terhadap pemikiran Habermas tentang rasionalitas komunikatif dalam kaitannya dengan diskursus mengenai ideologi. Gagasan Habermas dikontekstualkan dengan realitas komunikasi publik di Indonesia serta dihubungkan dengan aktualisasi ideologi Pancasila. Pendekatan ini memperluas horizon pemikiran filsafat sosial dengan menjembatani antara konsep normatif Habermas dan kondisi ideologis masyarakat pascakolonial. Selain itu, penelitian ini juga memberi sumbangan konseptual dalam memperkuat dasar filosofis Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih reflektif, kritis dan deliberatif. Berikut penjabaran secara lanjutan dari manfaat teoritis penelitian ini:

1. Memberikan kontribusi dalam studi filsafat sosial dengan mengkontekstualisasikan pemikiran Habermas dalam lanskap ideologi kebangsaan Indonesia.
2. Mengembangkan pemahaman kritis terhadap Pancasila sebagai ideologi yang terbuka dan dinamis melalui perspektif rasionalitas komunikatif.

3. Mendorong pembaruan konseptual terhadap paradigma komunikasi dan ruang publik dalam kajian ideologi.
4. Memperluas ranah kajian Pendidikan Kewarganegaraan dari yang bersifat normatif-dogmatis menjadi reflektif dan deliberatif.

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan praksis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Penelitian ini memberi landasan normatif untuk memperbarui pendekatan pembelajaran PKn yang tidak sekedar bersifat dogmatis dan hafalan, tetapi membangun diskursus dan kesadaran ideologis yang terbuka. Penelitian ini juga menjadi rujukan etis bagi penguatan budaya komunikasi publik yang inklusif dan rasional, serta mendorong institusi pendidikan dan negara untuk lebih partisipatif dalam merawat ideologi secara komunikatif. Berikut penjabaran secara lanjutan dari manfaat praktis penelitian ini:

1. Memberikan arah pembaharuan bagi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam diskursus nilai secara kritis dan partisipatif.
2. Menjadi sumber refleksi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penguatan ideologi Pancasila yang tidak eksklusif, tetapi komunikatif dan terbuka.
3. Mendorong institusi negara untuk memfasilitasi ruang publik yang lebih sehat, rasional dan inklusif dalam mempercakapkan nilai-nilai Pancasila.
4. Menyediakan alternatif pendekatan pedagogis yang relevan untuk membumikan ideologi secara dialogis dan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari warga negara.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berada dalam lingkup filsafat sosial-politik dengan keterkaitan kuat pada bidang Pendidikan Kewarganegaraan, terutama dalam usaha membangun pemahaman ideologi Pancasila secara reflektif, kritis dan

komunikatif. Fokus utama penelitian ini adalah pada pemikiran Jürgen Habermas, khususnya mengenai rasionalitas komunikatif sebagai respons terhadap dominasi rasionalitas instrumental yang menandai era modern. Konsep ini dianggap relevan untuk memperkaya perspektif pendidikan kewarganegaraan yang selama ini cenderung bersifat normatif, dogmatis dan minim partisipasi reflektif peserta didik.

Penelitian ini tidak berusaha mengulas keseluruhan filsafat Habermas, tetapi hanya menggarap bagian yang berelasi langsung dengan praksis ideologi dalam kehidupan publik, yaitu kritik terhadap rasionalitas instrumental, gagasan tindakan komunikatif, teori ruang publik serta kerangka demokrasi deliberatif. Semua konsep ini dibaca dalam rangka menyusun pendekatan baru terhadap pemaknaan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam ruang publik Indonesia, serta sebagai bahan pembelajaran yang kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan.

Dalam konteks itu, Pancasila tidak diposisikan semata-mata sebagai dasar negara atau dokumen konstitusional, melainkan sebagai arena atau ruang nilai yang dinamis maupun terbuka untuk ditafsirkan bersama oleh warga negara melalui proses diskursus. Penelitian ini mencoba membangun jembatan antara pemikiran filsafat sosial dan kebutuhan praksis pendidikan, khususnya dalam memperbaharui orientasi pendidikan kewarganegaraan agar lebih dialogis, inklusif dan membangun nalar publik yang rasional. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini bersifat konseptual, normatif dan reflektif. Penulis tidak mengumpulkan data empiris, melainkan melakukan studi kepustakaan secara mendalam dan penafsiran filosofis kritis. Pendekatan ini menggabungkan analisis pemikiran Habermas dengan pembacaan ideologis atas Pancasila dan relevansinya terhadap penguatan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang lebih demokratis dan emansipatoris.